BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Pilihan Rasional

1. Pengertian Pilihan Rasional

Sebagaimana dituturkan George Ritzer dalam *Sociology; A Multiple Paradigm Science* dikenal tiga rumpun paradigma dalam sosiologi. Tiga paradigma tersebut adalah paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Secara istilah, menurut Robert Friedrichs, paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang semestinya menjadi hal yang dikaji atau dipelajari. Sementara Ritzer mendefinisikan paradigma sebagai *what is the subject matter of science.*[1] Wirawan juga memberikan perumpamaan lain, bahwa paradigma adalah jendela keilmuan yang digunakan untuk melihat realitas dunia sosial.[2]

Berpijak pada hal ini, maka tatkala mengetengahkan suatu teori hendaknya dilacak pula bahwa suatu teori yang dimaksud, termasuk pada rumpun paradigma fakta sosial, definisi sosial, atau perilaku sosial.[3] Dalam hal ini, teori pilihan rasional dikategorikan dalam rumpun paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menjadikan tingkah laku manusia yang tampak dan kemungkinan pengulangannya (hubungan antar individu dan lingkungannya melalui stimulus dan respon) sebagai fokus utama.

Jika ditilik sejarahnya, teori pilihan rasional awalnya lekat dengan domain ekonomi. Namun seiring dengan berjalannya waktu teori pilihan rasional juga

---

[1]Chabib Mustofa, *Hand Out Teori Sosiologi Modern (tt)*
[2]I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2013), 1-2.
[3]Walau dalam perkembangannya, muncul pula rumpun paradigma lain, yakni paradigma positivistik, konstruksi sosial, dan kritis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk menjelaskan fenomena yang bersifat non-ekonomi. Dalam catatan Wirawan, selama dua dekade terakhir pilihan rasional telah muncul sebagai prespektif dominan dalam ilmu politik. Para ahli ekonomi-pun juga tak luput menggunakan prespektif pilihan rasional untuk menganalisis subjek di luar wilayah tradisionalnya (ekonomi).[4]

Secara definitif, Patrick Baert memberikan definisi teori pilihan rasional sebagai suatu teori sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku politik dan sosial dengan mengasumsikan bahwa seseorang bertindak secara rasional.[5] Sebagai catatan, dalam penelitian ini teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Patrick Baert yang akan digunakan sebagai pijakan.[6]

Patrick Baert dan beberapa teoritis lain menjadikan beberapa asumsi sebagai dasar teori pilihan rasional.[7] Asumsi pertama adalah intensionalitas. Dalam hal ini penjelasan intensionalitas tidak hanya menyatakan bahwa setiap individu bertindak dengan maksud tertentu –secara intensional–, namun juga dengan mempertimbangkan praktik sosial seperti keyakinan dan kepercayaan. Termasuk pula keinginan dari para individu yang terlibat. Penjelasan intensionalitas juga sering kali disertai dengan suatu pencarian terhadap efek agregat atau akibat-akibat yang tidak dimaksudkan dari tindakan purposif para pelaku pilihan rasional.

---

[4]Wirawan, *Teori-teori...* 190.
[5]Ibid., 209.
[6]Patrick Baert adalah professor dalam bidang teori sosial di University of Cambridge. Ia juga editor di *International Journal of Politics, Culture and Society.* Diantara karyanya adalah *The Existensialist Moment; Sartre's Rise as a Public Intellectual, Philosophy of the Social Sciences: Toward Pragmatism,* dan *Social Theory in the Twienth Century and Beyond* (dengan F.C. da Silva). Lihat Departement of Sociology, "Patrick Baert Head of Departement "http://www.sociology.cam.ac.uk/people/academic-staff/pbaert (Senin, 08 Agustus 2016 pukul 06.47)
[7]Wirawan, *Teori-teori...*, 210-212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada asumsi pertama ini, teori pilihan rasional oleh para teoris diberi catatan berupa “kontradiksi sosial” yakni *counterfinality* dan *suboptimality*. Dimaksud dengan *counterfinality* adalah tatkala ada asumsi seseorang bahwa apa yang dianggap sebagai hal yang bermanfaat bagi seseorang pada wilayah tertentu, secara otomatis bermanfaat pula bagi semua individu dalam wilayah tertentu.

Terkait *counterfinality* ini Sartre memberikan perumapamaan tindakan penggundulan hutan yang dilakukan oleh seorang petani. Ketika seorang petani berasumsi bahwa untuk mendapat lahan luas bisa diperoleh dengan menebangi pohon, nyatanya apa yang dilakukan oleh petani ini tidak memberikan kemanfaatan. Sebab hutan yang gundul dan ancaman erosi mengancam lahan pertanian itu sendiri. Pada posisi ini asumsi seseorang tentang kebermanfaatan, adalah “asumsi yang salah”.

Sementara *suboptimality* dimaksudkan ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan ia juga mengasumsikan bahwa orang lain akan memilih atau menggunakan strategi yang sama. Di sisi lain, seorang individu juga menyadari bahwa setiap individu akan mendapatkan keuntungan minimal ketika memilih stategi yang lain. Sebagai contoh, peperangan antara dua negara besar. Idealnya dalam kondisi ini dua negara mengurangi jumlah persenjataannya, tetapi keputusan yang terbaik dari dua negara ini adalah sama-sama menambah jumlah persenjataan, terlepas apapun keputusan yang diambil pihak lain.

Asumsi kedua adalah rasionalitas. Unsur kerasionalan dalam bertindak atau beraksi akan diketengahkan dalam penjelasan rasional ini. Rasionalitas seseorang akan berperan penting untuk menyusun rencana yang koheren dan di sisi lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoba untuk memaksimalkan kepuasan dirinya. Meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan juga menjadi poin yang tidak bisa diabaikan.

Adanya rasionalitas ini juga memberikan efek pada munculnya kecenderungan atau preferensi individu. Maksudnya, ada beberapa pilihan yang harus diputuskan menjadi pilihan yang pertama. Proses atribusi ini dapat terwujud melalui kecenderungan yang muncul dari individu saat dihadapkan pada beberapa pilihan. Sebagai contoh preferensi A atas B, preferensi B atas C, dan seterusnya.

Hal yang juga menjadi perhatian dalam rasionalitas ini adalah rujukan pada keyakinan dan preferensi individu yang sifatnya subjektif. Kondisi objektif yang melingkupi individu tidak menjadi perhatian dalam pilihan rasional. Hal ini memberikan implikasi pada kemungkinan munculnya tindakan rasional, namun berpijak pada keyakinan yang salah. Oleh karena itu mengumpulkan informasi untuk memperkuat keyakinannya adalah poin penting agar bisa dikatakan rasional. Akan tetapi, pengumpulan informasi yang tidak dikalkulasi juga tidak menutup kemungkinan melahirkan suatu hal yang irrasional. Seagai contoh, tatkala ada serangan justru terfokus pada pencarian informasi dan seluk-beluknya, sehingga serangan tersebut menjadi tidak terkendali dan berdampak buruk.

Asumsi ketiga adalah kondisi antara ketidakpastian dan risiko. Dalam hal ini seorang tidaklah bisa berada pada posisi mendapatkan informasi yang sempurna. Unsur ketidakpastian dan risiko tetaplah ada. Para teoris teori pilihan rasional mengamini hal ini, namun cenderung pada kondisi penuh risiko. Maksudnya adalah tatkala dihadapkan pada risiko seseorang dapat saja mengatribusikan berbagai kemungkinan yang telah diperkirakan, berikut konsekuensinya. Hal ini tidak bisa dilakukan ketika pada posisi ketidakpastian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan teoris pilihan rasional, ada dua alasan yang menjadikan posisi risiko sebagai fokus. Pertama adalah kondisi ketidakpastian jarang ditemui. Alasan kedua, ketika dihadapkan pada posisi risiko, teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa ada kemampuan untuk mengkalkulasi apayang diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan.

Sementara asumsi terakhir adalah perbedaan antara pilihan parametrik dan strategis. Pilihan parametrik adalah ketika seseorang berada pada posisi independen dari beberapa pilihan yang ditemui. Istilah independen dimaksudkan bahwa seseorang tidak perlu perhitungan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan orang lain. Sementara pilihan strategis menghendaki bahwa seseorang sebelum menentukan pilihan harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang lain. Penjelasan *counterfinality* dan *suboptimaly* kiranya dapat dikaitkan dengan pilihan strategis ini.

Dalam *Political Science and Rational Choice* William H. Riker menuturkan beberapa elemen pilihan rasional.[8] Elemen-elemen tersebut yakni; pertama, para aktor dapat merangking tujuan-tujuan, nilai-nilai, selera dan strategi yang diinginkan; kedua, para aktor dapat memilih alternatif terbaik yang sekiranya bisa memaksimalkan kepuasan aktor.

Berpijak pada elemen di atas ada beberapa komponen yang juga menjadi perhatian penting dalam teori pilihan rasional. Komponen pertama adalah perangkingan. Dalam perangkingan ini perangkat alternatif diasumsikan tertentu dan jumlahnya tetap. Sementara hal-hal yang dipercaya tidak relevan dikategorikan sebagai pilihan yang tidak mungkin.

---

[8]Ismail, *Buku Ajar Ekonomi Politik*, Program Studi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen kedua adalah kepercayaan. Adanya komponen kepercayaan ini menunjukkan bahwa individu-individu tidak bertindak semata-mata berdasar kebiasaan dan emosi, tetapi juga atas dasar kepercayaan tentang struktur sebab akibat. Komponen ketiga adalah kesempatan. Secara prinsipil setiap aktor mempunyai keinginan, namun tidak semua keinginan dapat tercapai sebab terbatasnya sumber daya dan kemampuan. Komponen terakhir adalah tindakan aktor, yang menggariskan adanya pilihan-pilihan dengan pertimbangan atau respons atas keadaan.

Sebagaimana dituturkan di muka, bahwa teori pilihan rasional telah masuk pada domain politik, ini juga ditegaskan (lagi) oleh Ismail. Tatkala menggunakan kerangka pilihan rasional, akan dapat dipahami rasionalitas politik dalam pemilihan. Sebelum menentukan pilihan, seseorang akan melakukan interpretasi politik dan perhitungan tentang tujuan, sarana, dan hal lain yang dapat menyokong terwujudnya harapan.[9]

2. Aplikasi Pilihan Rasional

Setelah dijelaskan beberapa hal penting yang melingkupi teori pilihan rasional, kini pengaplikasian melalui teori permainan (bagian dari pilihan rasional) akan dipaparkan. Lazimnya di dalam permainan terdapat minimal dua pemain yang berkontestasi untuk memperebutkan sesuatu. Termasuk pula dalam teori permainan ini. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan di atas (poin 1) terkait penggunaan strategi, maka dalam pengaplikasian pilihan rasional, hal tersebut juga sangatlah berpengaruh pada hasil.

[9]Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, tidak hanya strategi yang direncanakan oleh satu pemain, namun juga strategi yang digunakan oleh lawannya. Kehadiran teori permainan mencoba untuk mengulas dan memprediksi strategi-strategi pemain di mana mereka bertindak secara rasional berdasar pada informasi yang diperoleh. Walaupun, sekali lagi, terkait informasi ini tentu tidak akan sempurna. Begitujuga pencarian informasi yang berlebihan (tanpa perhitungan) juga akan berdampak buruk –seperti disinggung pada pembahasan asumsi kedua; rasionalitas–.

Ada dua model yang lazim dalam teori permainan; pertama teori permainan kooperatif; kedua teori permainan nonkooperatif. Teori permainan kooperatif menganalisis permainan-permainan koalisinal, begitujuga kekuatan yang dimiliki pemain, dan juga seputar pembagian hasil diantara koalisi. Sementara permainan non-kooperatif menggambarkan detail permainan dari setiap strategi-strategi yang diambil oleh pemain. Walaupun menggunakan istilah kooperatif dan nonkooperatif, namun tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dan konflik baik dalam kooperatif maupun nonkooperatif.[10]

Lebih lanjut, dalam hal ini ada dua bentuk permainan di dalam permainan nonkoperatif, yang dapat dibedakan menjadi permainan bentuk strategis dan permainan bentuk ekstensif. Dalam permainan bentuk strategis, para pemain dapat memilih strategi secara simultan (waktunya bersamaan). Sementara bentuk ekstensif cenderung mempertimbangkan sekian pilihan yang dikumpulkan untuk setiap permainan.

---

[10]Henny I, "Dasar Teori Permainan dan Lelang", http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/637/jbptitbpp-gdl-hennyikase-31825-3-2007ts-2.pdf (Selasa, 30 Agustus 2016, 07.09)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Patrick Baert memfokuskan pada bentuk permainan strategis, melalui dilema tahanan. Penggambaran yang ideal sebab relevansi dilema tahanan dengan hal-hal yang berkaitan dengan unsur sosial-politik. Dilema tahanan yang dimaksudkan adalah kondisi yang menghendaki pertarungan dan strategi secara rasional, tatkala dua orang tertangkap oleh petugas keamanan. Seorang dengan informasi yang dimiliki, bisa saja memilih strategi X agar bebas, dan seorang lain dihukum seumur hidup, atau memilih strategi Y agar sama-sama dihukum 5 tahun. Berikut uraiannya.

Tatkala si A dan si B tertangkap petugas keamanan, keduanya ditempatkan di ruang terpisah, kemudian masing-masing diberi pertanyaan tentang keterlibatan. Jawaban yang keluar dari masing-masing tahanan (si A dan si B) mempunyai konsekuensi dengan rincian; jika si A mengakui dan si B menolak mengakui maka si A bebas dan si B dihukum seumur hidup. Jika si A mengakui dan si B mengakui maka keduanya dihukum 20 tahun. Jika keduanya menolak mengakui maka keduanya akan dihukum 5 tahun. Rincian hukuman ini juga menjadi pilihan yang bisa dipilih si B. Tabel di bawah ini mencoba untuk menggambarkan rincian hukuman tersebut.

Si A	Si B			
	Menolak		Mengakui	
Menolak	3	3	1	4
Mengakui	4	1	2	2
	Si A	Si B	Si A	Si B

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catatan :

Pay-off[11] : 1 (hukuman seumur hidup), 2 (dua puluh tahun), 3 (lima tahun), 4 (bebas).

Baris : si A dan Kolom : si B

Perhitungannya adalah tatkala si B mengakui dan si A mengakui maka skor yang ditulis adalah sama-sama 2. Jika si B mengakui dan si A menolak maka si A mendapat skor 1 dan si B mendapat skor 4. Jika si B menolak dan si A mengakui maka si B mendapat skor 1 dan si A 4. Jika si B menolak dan si A juga menolak maka keduanya mendapat skor 3.

Rangkaian teori pilihan rasional ini akan diaplikasikan pada tataran sosial-politik, untuk menelaah kasus relasi kuasa NU dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014. Lebih praktisnya, teori pilihan rasional akan digunakan untuk melihat kerja rasional yang dilakukan oleh NU Jawa Timur dalam kontestasi pilpres 2004 dan pileg 2014.

B. Teori Politik Jawa

1. Tinjauan Wilayah Jawa

Wilayah Jawa, atau *tana* (tanah) Jawa merupakan jajaran pulau besar dari kepulauan Indonesia. Terkait nama Jawa, dalam arti terkait asal mula penyebutan nama sebagai wilayah Jawa, memang tidak ada kepastian. Namun beredar cerita tentang penemuan biji-bijian baru oleh para pendatang India yang diberi nama *jawawut.* Ada juga yang menyebut wilayah ini dengan *Nusa Hara-hara, atau*

[11]*Pay-off* adalah nomor tentang seberapa hasil yang diinginkan pemain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nusa Kendang, yang mempunyai makna masih liar atau yang bertepian dengan perbukitan.[12]

Sebagai sebuah komunitas masyarakat yang mempunyai sejarah panjang dalam peradabannya, banyak nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Jawa. Franz Magnis-Suseno menuliskan bahwa ada 4 lingkaran dalam pandangan dunia masyarakat Jawa. Lingkaran pertama adalah sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai sebuah kesatuan kesadaran antara manusia, alam dan dunia adikodrati. Lingkaran kedua adalah penghayatan kekuasaan politik sebagai perpanjangan tangan kekuatan adikodrati. Lingkaran ketiga adalah pengalaman mistis-batiniah manusia Jawa dalam memahami eksistensi dirinya sebagai bagian dari alam. Lingkaran keempat adalah penentuan semua lingkaran di atas sebagai bagian dari takdir kehidupannya.[13]

Asal mula penduduk di wilayah Jawa, disebut-sebut berasal dari nenek moyang dari pulau-pulau di timur semenanjung Asia yang merupakan wilayah pertamakali ditempati manusia. Di kawasan Asia Timur terdapat suatu bangsa yang besar, bangsa Cina, bangsa Jepang dan beberapa suku bangsa lain yang mendiami Semenanjung India di luar Gangga, dan juga di pulau-pulau selatan dan timurnya, sampai New Guinea.

Di kawasan ini ditemukan kemiripan ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Jawa dengan ciri-ciri bangsa yang disebut di atas. Begitujuga adanya kemiripan dengan bangsa Birma dan Siam. Berdasar kemiripan ini, baik secara

---

[12]Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, terj. Eko Prasetyoningrum, dkk. (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2014), 1.

[13]Aryaning A. Kresna, "The Concept of Power and Democracy in Javanese Worldview " http://www.researchgate.net/profile/Aryaning_Kresna2/publication/256765840_The_Concept_of_Power_and_Democracy_in_Javanese_Worldview/links/02e7e523beb9695617000000 (Jum'at, 08 Juli 2016, 10.37)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fisik, tingkah laku ataupun adat istiadat, memperkat dugaan bahwa penghuni pulau Jawa berasal dari pulau-pulau di wilayah antara Cina dan Siam. Terkait migrasi dan penyebabnya, memang tidak diketahui secara pasti apa yang melatarbelakanginya.[14]

Berkenaan dengan agama yang dianut oleh masyarakat Jawa, sebelum kedatangan agama Islam (yang kini menjadi keyakinan terbesar di kalangan masyarakat Jawa) masyarakat Jawa menganut agama Hindu. Dalam catatan sejarah dan tradisi umum di daerah, kerajaan Hindu Majapahit sekitar tahun 1475 M yang berdiri dan berkuasa di tanah Jawa harus tergeser sebab datangnya Islam. Pengaruh Islam juga dirasakan oleh Portugis ketika ia pertamakali berkunjung ke Bantam (kini Banten). Portugis menemukan raja Hindu di Bantam yang kehilangan hak atas propinsinya sebab keberadaan raja Islam yang berkuasa.

Meskipun Islam sudah menjadi agama masyarakat Jawa, namun tak semua elemen dari kalangan masyarakat Jawa yang masih enggan meninggalkan kebiasaannya dan memercayai institusi nenek moyang mereka. Secara dzahirnya masyarakat Jawa sudah tidak pergi ke candi, namun mereka masih menunjukkan perhatian yang tinggi pada hukum, adat-istiadat dan kebiasaan setempat yang telah ada sebelum datangnya Islam.[15]

Terkait suku Jawa, di Indonesia, suku ini menjadi suku mayoritas. Sebagaimana hasil laporan Badan Pusat Statistik dan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) suku Jawa adalah suku terbesar dengan proporsi 40,05 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara suku Sunda berada pada urutan

---

[14]Thomas Stamford Raffles, *The History of…* 32.
[15]Ibid., 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua, sebesar 15,50 persen.[16] Begitujuga di Jawa Timur, suku Jawa menjadi suku yang dominan disusul suku Madura.[17]

2. Teori Politik Jawa

Berkenaan dengan Teori Politik Jawa, dalam penelitian ini akan menggunakan teori yang dirumuskan Ben Anderson. Dalam karyanya ini Anderson menilai banyak karya ilmiah yang mengetengahkan sejarah dan kebudayaan Indonesia, terkhusus Jawa, namun sekian karya itu masih sedikit yang menyentuh wilayah baik mengenai konsep politik tradisional maupun pengaruhnya yang signifikan atas Indonesia masa kini.

Anderson hadir melakukan sebuah upaya penjabaran sistematis mengenai konsepsi tradisional Jawa tentang politik. Paparan tentang gambaran kehidupan sosial dan politik dalam kacamata Jawa ini berkelindan dengan upaya untuk menjabarkan teori politik pribumi, agar dapat membuktikan bahwa budaya tradisional Jawa memang memiliki teori politik.[18]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tidak sepenuhnya konsepsi Jawa tentang sosial dan politik mendapati kesesuaiannya. Sebab Anderson memotret gagasan politik Jawa tradisional sebelum masuknya kolonialisme. Sementara dalam penelitian ini, Jawa yang dimaksud adalah Jawa pasca-kemerdekaan (kurun waktu 2004-2014). Meskipun demikian, penggunaan Teori Politik Jawa ini sangat

---

[16]Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127 (Senin, 20 November 2016, 18.08)

[17]Website Pemerintah Provinsi Jawa Timur, “Sekilas Jawa Timur” dalam http://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur (Senin, 20 November 2016, 18.17)

[18]Ben Anderson, *Kuasa Kata Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, terj. Revianto Budi Santosa (Yogyakarta: MataBangsa, 2000), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan. Sebab, sebagaimana dipaparkan Anderson sendiri, Teori Politik Jawa ini menjadi langkah untuk memahami kondisi politik Jawa era kini.[19]

Kondisi ini menghendaki perlunya perumusan ulang konsepsi Jawa dengan tetap berpijak pada apa yang telah disampaikan Ben Anderson. Adapun perumusan ulang itu terwujud pada poin paduan Islam-Jawa, kekharismatikan penguasa, konsep kuasa dalam kacamata Jawa dan upaya mendapatkan kuasa. Poin-poin ini akan dipaparkan berurutan untuk menjelaskan kehidupan sosial politik suku Jawa sebagai suku mayoritas di Jawa Timur

a) Paduan Islam-Jawa

Tatkala Islam masuk ke tanah Jawa, Islam mengambil alih peranan-peranan tradisional yang telah ada di masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam. Di antaranya penasihat Istana, ahli nujum, dan begawan-pertapa. Sifat Islam yang asimilatif, pada gilirannya mendapati paduan antara apa yang berkembang dengan masyarakat Jawa dengan ajaran Islam. Sebagaimana dipaparkan di muka bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Jawa, sebelum kedatangan agama Islam adalah agama Hindu.

Anderson menilai, sifat asmilatif Islam yang masuk pada abad 15-16 menandakan adanya unsur besar yang sebangun dan berkesesuaian antara Islam dengan tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat. Di antara kesesuaian itu adalah pengasosiasian Islam dengan lambang kuasa dari zaman sebelumnya. Pengasosiasian itu terwujud pada istilah wali atau pewarta suci yang dikaitkan dengan budaya penting sebelum datangnya Islam seperti wayang.

[19]Ibid., 42-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsiran umum tentang pusaka Serat Kalimasada yang dimilik kakak tertua pandawa dalam cerita Mahabharata sebagai kalimat syahadat, mewakili pengasosiasian ini. Pusaka milik Prabu Yudhistira itu dimaknai sebagai ikrar akan keyakinan terhadap Islam. Di sisi lain, corak Islam ini sebelum sampai ke Jawa telah melewati daratan Persia dan India sehingga menyimpan unsur patrimonial. Unsur ini juga menemukan kesesuaiannya dengan pandangan dunia Jawa tradisional, berkenaan dengan peranan dan pentingnya penguasa.[20]

Sebagai catatan, karakter Islam yang masuk pada abad 15-16 Masehi ini menjadi karakter Islam ala NU. Sebagaimana catatan Agus Sunyoto, pada abad 15-16 juru dakwah yang menyebarkan ajaran Islam adalah Walisongo. Istilah Walisongo dalam pandangan masyarakat adalah ketua kelompok dari sejumlah mubaligh Islam yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah Jawa yang belum memeluk Islam[21]. Ajaran dakwah ala Walinsongo ini, pada gilirannya, sebagaimana dituturkan Siradj, (diteruskan) menjadi corak dakwah NU.[22]

Pada posisi ini, penulis berkesimpulan bahwa konsepsi Jawa tentang kuasa tidak hanya berkutat pada penguasa tradisional-kerajaan seperti raja, tetapi juga pada penguasa tradisional-keagamaan seperti kiai.

---

[20]Ibid.,147-149.

[21]Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo* (Jakarta: LESBUMI PBNU, Pustaka IIMaN, 2016), 142

[22]Ibid., xiii. Perpaduan budaya yang berkembang di masyarakat dan Islam, memang menjadi ciri yang lekat dengan pola dakwah NU. Bahkan Gus Dur dalam satu tulisannya menganalogikan salah satu penggalan ayat al-Qur'an, *nafsul muthmainnah* dan *nafsul lawwamah* dengan Pandawa dan Kurawa dalam cerita Mahabhata. Lihat Abdurrahman Wahid, *Musuh dalam Selimut* dalam *Ilusi Negara Islam,* ed. Abdurrahman Wahid (Jakarta: Wahid Institute, Maarif Institute, 2009), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Konsep kuasa

Di dalam tradisi Jawa kekuasaan adalah kenyataan yang nyata adanya, bukan merupakan postulat teoritis, tetapi merupakan suatu kenyataan eksistensial. Kekuasaan Jawa bersifat ilahiyah. Pun ada konsepsi bahwa seluruh kekuasaan sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama. Kuantitas kekuasaan tidak berubah, dan tidak patut mempertanyakan kekuasaan (yang diperoleh) absah atau tidak. Hal yang pasti adalah kekuasaan itu ada.[23]

c) Upaya mendapatkan kuasa

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, upaya untuk mendapatkan kuasa terdapat dua jalur. Pertama ortodoks, kedua heterodoks. Jalur ortodoks dimaksudkan pada sebuah usaha yogaistik dan laku tapa umpama puasa, meditasi, berpangkal seksual dan berbagai tipe "pengorbanan" lain. Nilai penting dari *laku tapa* yang demikian dimaksudkan semata demi mendapat kuasa. Sementara jalur kedua, heterodoks adalah merujuk pada sistem kepercayaan Bhairava, yang mengumbar hawa nafsu untuk mendapatkan kuasa. Pengumbaran nafsu dipercaya sebagai cara menuntaskan gairah-gairah sehigga tujuan akhir konsentrasi guna mendapat kuasa dapat tercapai.[24]

d) Kharismatik

Pengatributan para pengikut kepada pemimpin, atau pandangan pengikut kepada pemimpin yang luar biasa, mempunyai kekesuaian dengan konsepsi Jawa. Pada posisi ini seorang pemimpin dianggap sebagai titik sentral dari mana kuasa itu memancar, dan para pengikut melekatkan dirinya kepada pemimpin. Dalam

[23]Ben Anderson, *Kuasa Kata…* 49.
[24]Ibid., 50-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Anderson, konsepsi kharismatik didapatkan dari gagasan yang berkesuaian dengan konsepsi Jawa tentang Kuasa.[25]

Berpijak pada konstruksi teori politik Jawa ini, dalam pandangan penulis, akan layak digunakan untuk memotret relitas kultural Jawa Timur. Dalam arti Jawa Timur dengan suku Jawa sebagai mayoritas, dan di sisi lain kelompok keagamaan mayoritas adalah NU. Corak NU Jawa Timur yang memadukan Islam dengan kultur (baca: budaya Jawa), akan ditelaah menggunakan teori politik Jawa untuk melihat sejauh mana paduan Islam-kultur dalam pembentukan relasi kuasa NU Jawa Timur dan politik pasca-reformasi tahun 2004-2014.

Perpaduan *rational choice*-teori politik Jawa diharapkan dapat membedah sisi rasional para tokoh NU dan eratnya unsur Jawa sehingga akan maksimal dalam mengetengahkan relasi kuasa antara NU Jawa Timur dan konstelasi politik di Jawa Timur. Lebih spesifiknya, bagaimana proses terbentuknya relasi NU Jawa Timur dalam kontestasi pilpres 2004 dan pileg (DPD) tahun 2014.

[25]Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id